



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SEPTI SRI REJEKI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 147105

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.568.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 618.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/133 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 232.125.000

1. MOBIL, VW SEDAN Tahun 1965, WARISAN Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOBIL, CHEVROLET SPIN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000
5. LAINNYA, UNITY SEPEDA LISTRIK Tahun 2018, WARISAN Rp. 4.500.000
6. MOTOR, HONDA H1B02N42LO A/T / SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.625.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.270.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 65.806.275

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.904.201.275
III. HUTANG	Rp.	374.551.096
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.529.650.179

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.